

**ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM
PADA BANK SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP 5C
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.**

Oleh

**RICKI ARIYANTO
NPM :1551020281**

Program Studi :Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM
PADA BANK SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP 5C
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Dr. M. Nasrudin, M.Ag.
Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti untuk meningkatkan kegiatan usaha, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang memiliki produk pembiayaan tentunya memiliki berbagai macam risiko dalam penyaluran pembiayaan. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti BPRS Bandar Lampung.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana analisis pengukuran risiko pembiayaan produktif umkm pada Bank Syariah menggunakan konsep 5C.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dimana sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis akan dilakukan dengan *editing* data, *organizing* data, dan terakhir akan dilakukan analisis data.

Hasil dari penelitian ini, Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C, Dalam menganalisa terhadap pengukuran risiko pembiayaan, pihak bank harus mengetahui atau memprediksi risiko-risiko yang akan terjadi setelah pihak nasabah sudah diberikan pembiayaan, dalam hal ini kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BPRS dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, dan juga faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal. Adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, sistem *reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali.

Kata Kunci: *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif Umkm Menggunakan Konsep 5C*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricki Ariyanto

NPM : 1551020281

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif Umkm Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 April 2020
Penulis,

Ricki Ariyanto
NPM. 1551020281



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM
Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C (Studi Pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”**

Nama : Ricki Ariyanto
NPM : 1551020281
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Nasruddin, M.Ag
NIP.195809241990031003

Pembimbing II

Yulistia Devi, S.E., M.S.AK
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Produktif UMKM Pada Bank Syariah Menggunakan Konsep 5C (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”** disusun oleh Nama: **Ricki Ariyanto**, NPM: **1551020281**, Program Studi : **Perbankan Syariah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 31 Agustus 2020**.

TIM MUNAQSAH

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Taufiqur Rahman, S.E., M.Si.

(.....)

Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

(.....)

Penguji II : Yulistia Devi, S.E., M.S.AK

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. Al-Baqarah : 168).¹



¹ Deprtemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 25.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabiil'alamin dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta (Ayahanda Tasmiwiyanto dan Ibunda Ainul Rohmah) yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil, yang senantiasa mendoakan ku disetiap langkah ku demi tercapainya cita-citaku. Terimakasih Ibu dan Ayah atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang.
2. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang ku banggakan, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
3. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah G angkatan yang 2015 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini

RIWAYAT HIDUP

Ricki Ariyanto dilahirkan di Lamongan, pada tanggal 28 maret 1996 anak pertama dari dua Bersaudara dari pasangan Bapak Tasmiwiyanto dan Ibu Ainul Rohmah.

Pendidikan pertama kali di SDN MANUKAN KULON 6 Surabaya dan lulus pada tahun 2009. kemudian melanjutkan sekolah di SMP MUHAMMADIYAH 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Melanjutkan jenjang sekolah di SMK YADIKA Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015 . Tahun 2015 melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah pada saat itu dan sekarang FEBI pada jurusan Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN.

Riwayat hidup penulis belum selesai sampai disini, penulis mohon doanya agar senantiasa diberikan kemudahan baik hari ini maupun masa yang akan datang untuk selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “ Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah pada BTM Bimu dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Dr. M. Nasrudin, M.Ag.. (Pembimbing I) dan Yulistia Devi, S.E., M.S.AK., (Pembimbing II) sebagai dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan masukan, saran, kritik, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta motivasi kepada penulis.
5. Kepada kelompok KKN 228 yang senantiasa mendukung dan mendoakan ku dan teman-teman seperjuangan, Umi Lilis, Redo, Budi, Irvan, Fahmi, Randi, Apridhika terimakasih atas do'a dan dukungan selama ini.
6. Adik-adik Prodi Perbankan Syariah yang sedang berjuang menyelesaikan studinya tetap semangat dan kembangkan prestasi, kemampuan yang ada untuk mengharumkan citra kampus tercinta ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 April 2020
Penulis,

Ricki Ariyanto
NPM. 1551020281

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	18
1. Pengertian BPRS	18
2. Dasar Hukum	19
3. Tujuan BPRS	22
4. Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	23
5. Jenis Pembiayaan.....	26

B. Risiko Pembiayaan Bank Syariah	34
1. Pengertian Risiko Pembiayaan Bank syariah.....	34
2. Sebab-sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan	38
3. Faktor-faktor Intern Nasabah.....	39
4. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah.....	39
5. Upaya-upaya untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan	40
6. Upaya-upaya yang Bersifat Preventif.....	41
7. Upaya yang Bersifat Represif/Kuratif	50
8. Sanksi Administratif dan Ancaman Pidana	50
9. Sanksi Pidana.....	51
C. Strategi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bandar Lampung	52
1. Pembiayaan Bermasalah	52
2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan	54
3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	56
D. Kerangka Pikir.....	59
E. Tinjauan Pustaka.....	61

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	65
1. Sejarah Pendirian BPRS Bandar Lampung	66
2. Profil Perusahaan.....	69
3. Visi, Misi & Motto	69
4. Struktur Organisasi	71
B. Deskripsi Objek Penelitian	72
1. Pembiayaan Murabahah dan Ijarah.....	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	86
B. Upaya yang dilakukan Bank BPRS Bandar Lampung untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah.....	88

1. Rescheduling.....	88
2. Reconditioning.....	89
3. Restructuring.....	89
4. Penjualan Jaminan	92

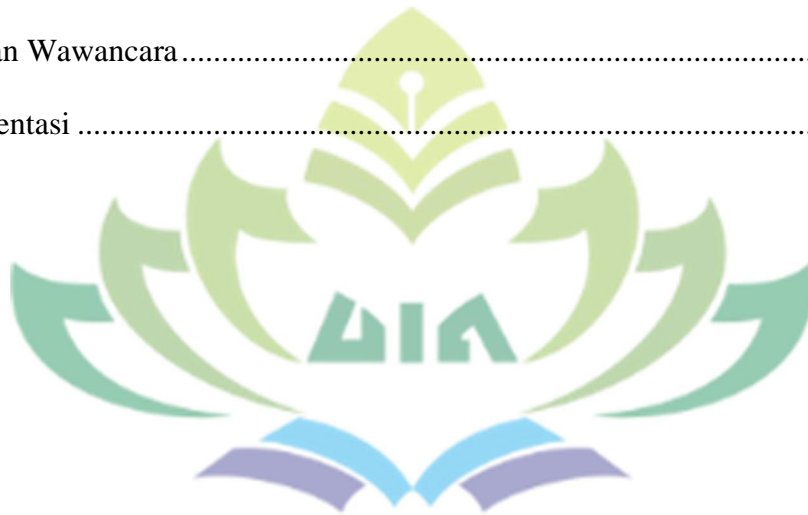
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	101
Dokumentasi	104



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Kolektibilitas Tahun 2017.....	6
Tabel 2	Kolektibilitas Tahun 2018.....	7
Tabel 3	Profil Perusahaan	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir 59
Gambar 2	Struktur Organisasi 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP 5C (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANDAR LAMPUNG).**

Adapun uraian dari pengertian istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²
2. Pengukuran adalah untuk menentukan nilai sebenarnya dari suatu parameter kuantitas.
3. Risiko pembiayaan produktif adalah suatu resiko atau kemungkinan terjadinya dampak yang berlawanan dalam pembiayaan seperti tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan modal kerja.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, h. 58.

4. UMKM adalah entitas yang sebagian besar masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah agar dapat terus berkembang.³
5. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴
6. Konsep 5c pada hakikatnya terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collatera*, yang pengertiannya adalah :
 - a. *Character*, menganalisa kinerja dan reputasi debitur sebelumnya.
 - b. *Capacity*, menganalisa seluruh rasio keuangan, survey kepada stakeholder perusahaan, dan survey ke perusahaan itu sendiri sehubungan dengan kemampuannya dalam melunasi pembiayaan yang diajukan.
 - c. *Capital*, menganalisa posisi keuangan perusahaan debitur secara keseluruhan
 - d. *Collateral*, menganalisa aset yang diserahkan keada bank sebagai agunan.
 - e. *Conditions*, menganalisa sejauhmana relevansi dari situasi ekonomi terhadap usaha debitur.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan di pilihnya judul ini adalah :

1. Secara Objektif

Ketertarikan penulis terkait perkembangan Bank Syariah saat ini, dimana lembaga inilah yang membantu Usaha Mikro Kecil Menengah dalam sektor pemberian pembiayaan. Potensi yang sangat besar yang dimiliki UMKM, membuat UMKM menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang merasakan dampak

³ Suetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 346.

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58.

dari UMKM pemerintah pun merasakan. Dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Namun terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi yaitu risiko-risiko dalam pemberian pembiayaan produktif pada UMKM. Padahal pembiayaan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha.

2. Secara Subjektif

- a. Permasalahan ini sangat menarik bagi penulis, dimana penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai pembelajaran bersama mengenai risiko pembiayaan produktif UMKM pada bank umum syariah.
- b. Tema yang diteliti sangat relevan dengan ilmu yang sedang penulis geluti yaitu ilmu perbankan syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi Revisi 2008, h. 11.

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal (1)

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat selama 20 tahun perkembangannya dengan percepatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013 yang dikeluarkan Bank Indonesia, aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) posisi Oktober 2012 (yoy) sebesar Rp.179,04 triliun atau meningkat sebesar 37% dari posisi yang sama tahun 2011. Di samping meningkatnya *return*, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang cepat selama ini berpotensi meningkatkan risiko industri perbankan syariah, karena jaringan layanan yang semakin luas dan jenis produk yang semakin kompleks.

Dalam dunia perbankan, kata risiko telah menjadi populer setelah banyak bank bergelimpangan dihantam beragam risiko. Selanjutnya metode dan teknik untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) dalam mengelola risiko terus dikembangkan dengan berbagai Variasi. Salah satu instrumen pengukuran risiko adalah konsep 5C. Konsep 5C dapat diartikan sebagai cara untuk mengevaluasi calon nasabah, dengan begitu dapat meminimalisir kerugian maksimal pada periode tertentu.

Dalam syariah risiko selalu mengikuti *return*. Semakin tinggi tingkat *return* yang diharapkan, semakin tinggi risiko yang dihadapi. Setiap *return* selalu beriringan dengan risiko. Risiko yang dominan dalam perbankan syariah adalah risiko terkait dengan pembiayaan. Dalam syariah risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat ditransfer atau dibagi atau dikelola. Oleh karena itu ekonomi syariah lebih mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana *return* maupun risiko dibagi kepada para pihak yang bekerjasama.

Resiko merupakan suatu kemungkinan yang akan terjadi dalam segala hal, peluang terjadinya risiko tergantung dari risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Untuk itu diperlukan suatu metode yang dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian. Maka dari itu BPRS Bandar Lampung menggunakan konsep 5C, dimana 5C adalah salah satu konsep untuk meminimalisir tingkat resiko kerugian yang mungkin terjadi di suatu lembaga ataupun badan usaha, termasuk di BPRS Bandar Lampung.

Dalam konsep 5C, kemungkinan kerugian dihitung dari menganalisa calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Konsep 5C selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang akan terjadi. Konsep 5C ini diadakan untuk dengan harapan sebagai bahan referensi terutama bagi para analis kredit perbankan. Karena bank tentu tidak mau asal memberikan kredit mereka kepada nasabah. Bagi pihak bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka.

BPRS Bandar Lampung menggunakan konsep 5C karena konsep ini fokus pada kemungkinan resiko kerugian selain itu, konsep ini dapat diaplikasikan ke seluruh produk-produk finansial yang diperdagangkan. Hasil yang diperoleh dari konsep ini merupakan hasil analisis secara menyeluruh terhadap calon-calon nasabah. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Orang seperti inilah yang dianggap nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Orang yang dapat memenuhi konsep 5C yang

baik adalah manusia yang ideal dari berbagai aspek kehidupan. Konsep 5C ini memfokuskan pada kondisi nasabah secara mendalam yang cara ini tidak ditemukan pada metode pengukuran resiko lainnya.

Risiko pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi liabilitas terhadap pihak bank. Setiap resiko harus segera mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak mengganggu keberlangsungan usahanya. Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sekilas kita melihat pada sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dimana pada waktu itu terjadi krisis yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha besar saat itu satu persatu mengalami pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.

Adapun data rekapitulasi perhitungan kolektibilitas di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung Pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1
Tabel Kolektibilitas Tahun 2017

NO	PEMBIAYAAN SEKTOR RIIL		NASABAH
1	KOLEKTIBILITAS 1	Rp 3,054,410,618.00	53
2	KOLEKTIBILITAS 2	0	0
3	KOLEKTIBILITAS 3	0	0
4	KOLEKTIBILITAS 4	Rp 104,134,633.00	3
	JUMLAH	Rp 3,158,545,251.00	56

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2017

Tabel 2

Tabel Kolektibilitas Tahun 2018

NO	PEMBIAYAAN SEKTOR RIIL	NASABAH
1	KOLEKTIBILITAS 1 Rp 1,951,113,116.00	38
2	KOLEKTIBILITAS 2 0	0
3	KOLEKTIBILITAS 3 Rp 94,134,633.00	1
4	KOLEKTIBILITAS 4 Rp 85,000,000.00	2
	JUMLAH Rp 2,130,247,749.00	41

Sumber : BPRS Bandar Lampung 2018

Risiko pembiayaan macet pasti dimiliki setiap lembaga maupun badan usaha, termasuk di BPRS Bandar Lampung. Ada beberapa strategi yang dilakukan bank-bank syariah dalam menekan resiko pembiayaan macet, yaitu Bank membentuk divisi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang menangani secara khusus pembiayaan bermasalah, Bank juga harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara yang tepat dan efektif, Bank membuat kebijakan secara hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan sehingga tidak didesak oleh pengejaran target.

Bank mengkaji terlebih dahulu potensi dasar pasar dari suatu bisnis dengan mencadangkan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan dan non keuangan dengan standar keuangan yang berlaku, Bank harus memonitoring secara intensif kesemua nasabah yang bersangkutan, dalam hal ini pihak Bank dan nasabah melakukan perjanjian tertulis dimana nasabah akan melunasi tunggakan kepada bank pada waktu yang telah ditentukan. Startegi ini merupakan cara untuk menekan terjadinya resiko pembiayaan macet. Namun jika dilihat dari table laporan keuangan pada BPRS Bandar Lampung tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Dimana terlihat angka pembiayaan macet

pada tahun 2017 adalah Rp. 104,134,633 dan angka pembiayaan macet pada tahun 2018 adalah Rp. 179,134,633 dengan begitu terlihat kenaikan pembiayaan macet sebesar Rp. 75,000,000.

Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan pembiayaan macet diantaranya adalah terjadi masalah pada nasabah diluar dari sepengetahuan pihak bank, kurangnya keterbukaan nasabah ke pihak bank sehingga pihak bank tidak mengetahui secara detail kondisi nasabah tersebut, terjadi masalah tak terduga dari pihak nasabah misalnya nasabah jatuh sakit, kecelakaan hingga meninggal dunia. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan naik atau turunnya pembiayaan macet dari suatu bank yang tidak dapat dipantau pihak Bank.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pengembangan usaha nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industry keuangan, terutama bank untuk menyalurkan

pembiayaan. Karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan.⁷

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia di era seperti saat ini mempunyai peran yang sangat berarti. Peran UMKM sebagai penyanggah ekonomi rakyat dan juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan tidak perlu diragukan lagi.⁸ Dalam pengembangan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Kemudian menghadirkan berbagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha lainnya.

Melihat besarnya jumlah pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, UMKM layak mendapat perhatian. Berkembangnya UMKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi.⁹

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

⁷ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: 2015), h. 1.

⁸ Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019, h. 78.

⁹ Nur Wanita, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 252.

Di samping itu banyaknya potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan.

Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan UMKM bukan hal yang mudah. UMKM memiliki masalah yang kompleks, dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi kelemahannya adalah hal keterbatasan modal usaha, pengelolaan SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan bahan baku, dan keterbatasan perluasan pemasaran.

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah.¹⁰

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah perlu di selenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan

¹⁰ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 no. 1, April 2013, h. 122.

iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan.¹¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung sudah menerapkan beberapa strategi untuk menekan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Namun melihat dari laporan kolektibilitas menunjukan adanya kenaikan pembiayaan macet dari tahun 2017 sampai tahun 2018, Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS PENGUKURAN RISIKO PEMBIAYAAN PRODUKTIF UMKM PADA BANK SYARIAH MENGGUNAKAN KONSEP 5C (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pengukuran risiko pembiayaan produktif umkm pada Bank Syariah menggunakan konsep 5C ?
2. Bagaimana strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank BPRS Bandar Lampung?

¹¹ Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, April 2018, h. 3-4.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menjelaskan analisis pengukuran risiko pembiayaan produktif umkm pada Bank Syariah menggunakan konsep 5C.

F. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung serta bagi instansi terkait sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menentukan strategi dan kebijakan penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau sumbangsih pemikiran yang terkait dengan Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan terutama pembiayaan produktif untuk UMKM.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan dijadikan sarana teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan serta menambah wawasan mengenai manajemen resiko pembiayaan produktif yang terdapat pada UMKM.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹²

Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang berbentuk pendekatan deskriptif untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik dari variabel yang diteliti dalam suatu

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 3.

situasi. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk (*field research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian ini dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintah.¹³

3. Sumber Data

Sebagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha yang menjadi nasabah BPRS Bandar Lampung yang menggunakan produk pembiayaan UMKM dengan total jumlah populasi tahun 2017 sebanyak 38 orang dan tahun 2018 sebanyak 53 orang.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 205.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet Ke 14, h. 80

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Peneliti mengambil sampel dengan mengacu pada data yang terdapat pada laporan keuangan ditahun 2017 kolektibilitas 3 (kurang lancarnya pembayaran terjadi ketterlambatan 3-4 bulan) sebanyak 2 orang dan kolektibilitas 4 (diragukan karena pembayaran terlambatleih dari 4 bulan) sebanyak 1 orang, dan pada tahun 2018 kolektibiltas 4 sebanyak 3 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (*fenomena*) yang sedang diteliti.¹⁵ Peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat atau mengamati secara langsung risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan produktif UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat SBandar Lampung.

b. Wawancara

¹⁵ Arsyad Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2008), h. 84.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.¹⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dede, Bapak Dephi Wibowo selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Bapak Marsono selaku Direktur BPRS Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara penulis mendapatkan data, yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Metode ini dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data dari tempat yang akan diteliti.

6. Analisis dan Pengolahan Data

Setelah data sudah dikumpulkan melalui proses di atas, peneliti mengolahnya dengan beberapa metode sebagai berikut :

a. *Editing*

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 316.

¹⁷ *Ibid.*, h. 240.

Proses mengoreksi kembali terhadap catatan, berkas, dan informasi yang dikumpulkan peneliti dan data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah. Melalui *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisa.¹⁸

b. *Organizing*

Menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁹

c. *Analyzing*

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 152.

¹⁹ *Ibid.*, h. 152.

²⁰ Kaelan M.S, *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*, Yogyakarta : Paradigma, 2012, h. 335.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syari'ah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:²¹

- a. Akad dan aspek legalitas. dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan Agama.
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h. 56.

Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²² Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini vberarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut vBPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus vdibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).²³

2. Dasar hukum

a. Al-Quran

Dasar hukum, sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an antara lain:

²² Khotibul Umam, *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009, h. 41.

²³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009, h. 7.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS : Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat di atas, secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba, dan gambaran karakter atau watak kehidupan pemakan riba yang mirip atau bahkan sama dengan orang yang kesurupan setan atau kesetanan. Penyebab kesetanan pemakan riba itu, justru karena bersangkutan tidak lagi bisa membedakan antara jual beli yang dihalalkna dengan riba yang diharamkan, dan berpendapat bahwa

jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal, jual beli yang dihalalkan jelas sangat berbeda dengan riba yang di haramkan.

b. Undang-undang tentang BPRS

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syari'ah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴ Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

3. Tujuan BPRS

²⁴ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 3.

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun tujuan operasional akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai prospek kedepan seperti apa yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
- b) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- c) Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.²⁵

BPRS dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat yang ekonominya terbatas, dengan segala produk yang dimiliki BPRS sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat melakukan pembiayaan bagi yang membutuhkan dana. Bagi masyarakat yang memiliki kemauan bekerja namun tidak memiliki dana dapat melakukan pembiayaan produktif. Namun masyarakat yang membutuhkan sesuatu untuk dikonsumsi maka masyarakat dapat melakukan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan

²⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 129.

barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁶

Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.²⁷

4. Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

²⁶ Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 61.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 160.

- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi:

- a. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada par nasabah Bank Syari'ah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta usahanya harus halal).
- b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah, Bank Syari'ah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syari'ah maupun bagi nasabah bank Syari'ah. Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan ekonomi umat
 - 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
 - 3) Meningkatkan produktifitas
 - 4) Membuka lapangan kerja baru
 - 5) Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan konsumtif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan produktif,

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor *real*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1) Pembiayaan menurut tujuan, yaitu :

(a). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

(b). Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu :

- (a). Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- (b). Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (c). Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

5. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

1). Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil.²⁸ Kemudian pembiayaan yang berperinsif bagi hasil terdiri dari dua yaitu:

a). *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 124-125.

menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²⁹

Adapun landasan hukum akad *Mudharabah* Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzamil 20 yang berbunyi:



وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan*

²⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 192.

*kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*, memutuskan menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh).³¹

b). Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³² Pada koperasi syariah, *Musyarakah* adalah suatu bentuk kerja sama antara *Baitul Mal Wattamwil* dengan para anggotanya. Baik *Baitul Mal Wattamwil* maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha. *Baitul Mal Wattamwil* pembiayaan *Musyarakah* digunakan *Baitul Mal Wattamwil* untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati.³³

³⁰Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 376.

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

³²Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, praktik dan prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 63.

³³Sumber SOP KSPPS Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU.

Adapun landasan hukum akad *Musyarakah* Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Sad 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.³⁴

b. Pembiayaan Investasi

1). Akad Pola Sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *Ijarah*. *Ijarah*, isilah *Ijarah* lebih sering dikenal dengan system sewa, jasa, atau imbalan, adalah

³⁴Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 363

akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa

2). Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah istilah dalam fiqh Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mrngsmbil manfaat dengan jalan penggantian.³⁵

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.³⁶

Adapun landasan hukum akad *Ijarah* Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ
خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى
أَبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 99.

³⁶ A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 269.

حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".³⁷

3).Jual Beli

Jual beli (buyu', jamak dari bai') atau perdagangan atau perniagaan atau trading, secara terminology Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.³⁸

Adapun landasan hukum jual beli dibolehkan di dalam Syariah Islam Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³⁷Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 706.

³⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 25.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁹

a) *Murabahah*

Menurut Fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 *Murabahah* yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁰

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5 menyatakan bahwa *murabahah* akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang

³⁹ Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 65.

⁴⁰ Osmad Muhaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57.

disepakati dan penjual harus mengungkapkan bahwa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴¹

Adapun ayat memperbolehkan jual beli diantaranya dibolehkan di dalam Syariah Islam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٤٢}

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴²

b). Pembiayaan Istishna

Bai'istishna yaitu akad jual beli, dimana bank memesan barang terlebih dahulu yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kejelasan barang yang akan dipesan, dan dengan margin yang disepakati bersama dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan apakah dimuka, cicilan, ataupun dibayar belakangan.⁴³

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil juga dapat juga dipenuhi dengan akad istishna'. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan

⁴¹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba 4, 2009), h. 180.

⁴² Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 75.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 96.

input produksi sebagai modal istisna' yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.⁴⁴

B. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam perlunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dan masyarakat tersebut.⁴⁵

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.

Di samping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang

⁴⁴ *Ibid*, h. 125.

⁴⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 89

dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).⁴⁶

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah pendanaan istilah “kredit bermasalah” diperbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *non performing loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.⁴⁷

Namun, dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkuang/menurun dan

⁴⁶ Lampiran 1 SEBI No. 13/10/Dpbs tanggal 13 april 2011, huruf C butir a dan b.

⁴⁷ *Ibid.,h.* 89

bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan cadangan umum PPA untuk Aktiva Produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar. Pembentukan cadangan khusus PPA ditetapkan paling rendah sebesar :

- a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- b. 15% (lima belas perse) dari Aktiva Prodiktif dan Aktiva Nonproduktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Nonproduktif yang digolongkan Diragukan setelh dikurangi nilai agunan; atau
- d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Nonproduktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kewajiban membentuk PPA tersebut tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Ijarah* atau Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.⁴⁸

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF), berarti telah timbul bagi bank syariah, yaitu nasabah tidak atau belum untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar

⁴⁸ Pasal 41 No. 13/13/PBI/2011

imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan. Tetapi menurut hemat Penulis gejala risiko perlu diwaspadai pada saat kualitas pembiayaan dari lancar menjadi dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), dimana sudah terdapat utnggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan atau terdengar tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.⁴⁹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh penghasilan.⁵⁰

Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pendapatan berupa imbalan tersebut. Selanjtnya dana yang dikembalikan oleh nasabah kemudian dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembbiyaan, dan seterusnya bank akan mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan

⁴⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 91

⁵⁰ Pasal 1 ayat 2, Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.

2. Sebab-sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena factor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor-faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- 1). Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- 2). Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3). Para anggota komite yang tidak mandiri.
- 4). Pemutusan kredit “takluk” rekanan yang dating dari pihak eksternal.
- 5). Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6). Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7). Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 8). Pejabat bank, baik yang melakukan analis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 9). Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

3. Faktor-faktor Intern Nasabah

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
- c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pembororsan.

4. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah :

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan di dalam negeri.
- f. Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah.
- g. Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- h. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- i. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).
- j. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

5. Upaya –Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara

yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.⁵¹

Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan membayar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.⁵²

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang disebabkan oleh berbagai factor tersebut di atas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.⁵³

6. Upaya-upaya yang Bersifat Preventif

a. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan

⁵¹ Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah.

⁵² Pasal 5 ayat 1 huruf a PBI N o. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁵³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 95

daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur enyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.⁵⁴

b. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerangkan manajemen risiko sebagaimana telah ditemukan sebelumnya, melaksanakan prinsip kehati-harian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsi kehati-hatian.

Pasal 35 UU Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UU dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum

⁵⁴ penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah

memberikan pembiayaan, yaitu bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.⁵⁵

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah dan/atau UUS :

- 1) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon sebagai penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. “Kemauan” berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS. “Kemampuan” berkaitan dengan keadaan dan/atau aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS.
- 2) Wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan fasilitas. Kelima faktor tersebut dalam perbankan syariah dikenal dengan “*five C’s*”. Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dan/atau UUS dan

⁵⁵ Pasal 23 UU perbankan Syariah

nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beretiket baik, dan tidak menyulitkan bank syariah dan/atau UUS dikemudian hari.

Dalam penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas, bank harus meneliti keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu, ataupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila

nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Dalam penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.⁵⁶

Analisis (penilaian) terhadap faktor “*five C’s*” dilakukan oleh petugas analisis pembiayaan suatu bank syariah sebelum pembiayaan diberikan, meliputi aspek yuridis dan nonyudiris (aspek *financial*) yang terkait dengan faktor “*five C’s*” tersebut. Untuk itu, dalam praktik bank perlu meminta data yang terkait dengan “*five C’s*”, antara lain data keuangan dan data yudiris. Data keuangan seperti neraca dan rugi laba perusahaan, fotokopi rekening koran yang memuat aktivitas keuangan dalam suatu periode tertentu. Data yudiris antara lain identitas perusahaan dan pengurus, izin-izin dari pihak yang berwenang, bukti kepemilikan agunan, dan sebagainya.

Data mengenai calon nasabah penerima fasilitas juga dapat diminta oleh bank syariah kepada biro Informasi Kredit di Bank

⁵⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 95

Indonesia Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur/nasabah penerima fasilitas yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang disemua Bank Indonesia dari bank-bank pelapor.

Biro Informasi Kredit bertugas menghimpun dan menyimpan data perkreditan yang hasil olahannya akan didistribusikan kepada bank-bank anggotanya. Dengan sistem tersebut, debitur/nasabah penerima fasilitas akan mendapatkan *Debtor Identification Number (DIN)* yang merupakan identitas debitur/nasabah penerima fasilitas yang akan digunakan oleh semua bank sebagai identitas debitur penerima fasilitas sehingga bank dapat mengakses informasi debitur penerima fasilitas tertentu lengkap dengan detail fasilitas dari bank lain yang tercatat di *Sistem Informasi Debitur*.

Tersedianya informasi debitur penerima fasilitas akan membantu perbankan mempercepat pengambilan keputusan pembiayaan sehingga penyaluran pembiayaan berjalan lancar. Tujuan pengadaaan Sistem Informasi Debitur adalah untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan disiplin pasar.

Bank-bank wajib menyamakan Laporan Debitur keada Bank Indonesia setiap bulan, meliputi antara lain informasi mengenai

debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan dan penjamin, serta keuangan debitur.⁵⁷

Dari penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah, khususnya paragraf empat, yaitu terkait dengan penilaian agunan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (2) jenis agunan pembiayaan :

- a. Pertama, agunan berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan. Dalam perbankan, agunan yang berasal dari pembiayaan seperti itu disebut “agunan pokok”.
- b. Kedua, adalah berupa barang lain, surat berharga, atau garansi risiko yang tidak bersumber dari pembiayaan. Agunan yang tidak bersumber dari pembiayaan itu disebut “agunan tambahan”. Lazimnya dalam praktik perbankan, apabila nilai agunan pokok sudah mencakup nilai pembiayaan yang diberikan, maka agunan tambahan tidak diperlukan. Agunan harus *marketable* (mudah dijual) dan harus diikat secara sempurna sesuai jenis agunannya. Barang tetap berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat misalnya, diikat dengan Hak Tanggungan, barang bergerak diikat secara fidusia atau gadai tergantungan barang agunannya.

Karena itu, untuk mengurangi risiko dan melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut, bank syariah mengupayakan agar faktor-faktor internal bank sebagaimana dikemukakan di atas agar

⁵⁷ PBI No. 9/14/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan SEBI No, 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008.

terhindar, memintakan agunan yang *marketable* dan nilainya dapat mencakupi pembiayaan yang diberikan serta melakukan pengikat agunan yang sempurna. Untuk pembiayaan kepada usaha kecil menengah dan koperasi, bank juga dapat memintakan jaminan dari lembaga penjamin, misalnya PT Askrindo dan PT Jamkrindo sesuai ketentuan yang berlaku bagi lembaga tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 PBI No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, ditegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank termasuk bank oleh direksi dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *good corporate governance* yang berlaku bagi bank.

Di samping itu, dalam pelaksanaan prinsip syariah oleh bank syariah, dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 PBI tersebut di atas :

- a) DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nassihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Agar dapat melaksanakan tugas tersebut secara efektif, anggota DPS yang bersangkutan harus lebih dulu memahami dengan baik jenis-jenis kegiatan usaha dari pihak bank yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan ketentuan perundang-undangan yang terkait lainnya, berikut *feature product*-nya. Sehingga ia dapat mengetahui, misalnya apakah dalam menetapkan formulasi/rumus atau cara besarnya imbalan bank syariah bersangkutan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menggunakan formulasi yang identik dengan angka bunga sebagaimana halnya bank konvensional yang dianggap sebagai *riba nasiah*.

b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut meliputi antara lain :

- (1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atau edoman oprasional dan roduk yang dikeluarkan bank;
- (2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
- (3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- (4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana seta pelayanan jasa bank; dan
- (5) Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dari penilaian terhadap faktor “*five C’s*” yang dilakukan sebelum pembiayaan diberikan, bank syariah dan/atau UUS doharapkan dapat menyimpulkan bahwa penyaluran dana kepada calon nasabah penerima fasilitas tersebut layak untuk disalurkan atau tidak.

c. Upaya-upaya Preventif setelah Permohonan Pembiayaan Disetujui

Upaya-upaya yang bersifat preventif juga dilakukan setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh bank syariah dan/atau UUS, antara lain sebagai berikut :

- 1) Akad pembiayaan harus dibuat secara baik sehingga menjamin kepentingan bank dan nasabah;
- 2) Akad pembiayaan memuat klausul adanya jaminan pembiayaan (*collateral*);
- 3) Jaminan pembiayaan bersifat kebendaan dan/atau bersifat perorangan;
- 4) Jaminan kebendaan harus diikat secara sempurna sesuai dengan jenis jaminan (Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia, Resi Gudang);
- 5) Jaminan mudah dicairkan dan/atau mudah dijual (*marketable*);
- 6) Nilai jaminan dapat menjamin (mencakupi) seluruh kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada bank;
- 7) Nilai pengikatan agunan menjamin kepentingan bank;
- 8) Penutupan asuransi dengan syarat *banker's clause*;
- 9) Pemantauan atau pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan apakah terjadi penyimpangan (*side streaming*) dari rencana semula.

7. Upaya yang Bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings/NPF*).

8. Sanksi administratif dan ancaman pidana

Selain risiko kegiatan usaha tersebut diatas maka perlu juga dipahami terdapat risiko administratif dan ancaman pidana terhadap bank syariah dan manajemen serta pegawai bank syariah sebagai berikut :

a. Sanksi Administratif

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang :

- 1).Menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya, atau
- 2).Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Perbankan Syariah

Bentuk sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 58 UU Perbankan Syraiah yaitu berupa :

- (1)Denda uang;
- (2)Teguran tertulis;
- (3)Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS;
- (4)Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- (5)Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan;
- (6)Pemberhentian pengurus bank syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjukkan dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (7)Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
- (8)Pencabutan izin usaha.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Karena itu, kewenangan untuk

menjatuhkan sanksi administratif dalam Pasal 56 UU Perbankan Syariah tersebut di atas, yang semula menjadi kewenangan Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013 beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

9. Sanksi Pidana

Ancaman pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Perbankan Syariah diatur antara lain dalam Pasal 63 ayat (2) yang menegaskan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang :

- a. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kataatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini;
- b. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun *dan* pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya kata “dan” berarti ancaman pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif, bukan *alternative*.

C. Strategi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bandar Lampung

1. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa diubah.⁵⁸

a. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa factor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu:⁵⁹

1). Sisi Nasabah

a). Faktor keuangan

- (1). Hutang meningkat sangat tajam,
- (2). Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset,
- (3). Pendapatan bersih menurun,
- (4). Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat, Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan
- (5). Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
- (6). Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.

⁵⁸Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 268

⁵⁹*Ibid.*,h. 269

- (7). Piutang tak tertagih meningkat,
- (8). Perputaran persediaan semakin meningkat,
- (9). Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur,
- (10). Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu

b). Faktor operasional

- (1). Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun,
- (2). Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong,
- (3). Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama,
- (4). Pembinaan sumber daya manusianya kurang baik,
- (5). Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

2). Sisi Eksternal

Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah:

Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil,

- a) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah,
- b) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi,
- c) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah,
- d) Meningkatnya suku bunga pinjaman,
- e) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya,
- f) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya,
- g) Bencana alam,
- h) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

3). Sisi Bank

Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan

bermasalah:

- a) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja,
- b) Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan musiman,

- c) Menerbitkan cek kosong,
- d) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan,
- e) Adanya over pembiayaan atau under financing,
- f) Manipulasi data,
- g) Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- h) Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif,
- i) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan,
- j) Kelemahan dalam pembinaaan dan monitoring pembiayaan.⁶⁰

2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:⁶¹

a. Lancar atau kolektabilitas

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang lancar atau kolektabilitas

- 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat *cerukan/ overdraft* yang berulang kali khususnya untuk

⁶⁰ Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 269-270

⁶¹ Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 252

- menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan
- 6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

c. Diragukan atau kolektabilitas

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan
- 2) atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari
- 3) Terjadi *cerukan/ overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- 4) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
- 5) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 6) Pelanggaran yang *principal* terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan

d. Macet atau kolektabilitas

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada⁶²

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum,

⁶² Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 253-257

strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan sesuai target.⁶³

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.⁶⁴

b. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

- 1). Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- 2). Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya
- 3). Memanfaatkan atau mengeksplorasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4). Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan,

⁶³ Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, h. 2.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 6

- yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- 5). Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
 - 6). Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.⁶⁵

c. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam melakukan pembiayaan pasti sudah melakukan analisis atau penyelidikan terhadap calon debitur. Tetapi dalam perjalanannya akan banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti pembiayaan macet. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan yang terjadi, kesalahan dari pihak lembaga dan dai peminjam/debitur. Jika dari lembaga biasanya adanya kesalahan dalam analisis atau kurang teliti. Dan dari pihak debitur yang biasanya ada unsur kesengajaan dan tidak disengaja. Yang disengaja biasanya tidak ada kemauan si debitur untuk membayar angsuran pinjaman. Dan yang tidak disengaja biasanya adanya musibah, seperti kebakaran atau bencana alam lainnya.

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan macet, sebagai berikut :⁶⁶

- 1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

⁶⁵ *Ibid.*, h. 7

⁶⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, h. 110-111.

Biasanya pihak lembaga akan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. Jika perpanjangan jangka waktu kredit itu contohnya jangka waktu nya 6 bulan, lalu diperpanjang menjadi 1 tahun. Jika jangka waktu angsuran nya contohnya angsuran yang diberika 36 kali, diperpanjang jadi 48 kali.

2) Diperbaiki (*reconditioning*)

Dilakukan dengan mengubah beberapa persyaratan yang ada seperti:

- a) Bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penurunan suku bunga/persentase bagi hasilnya.
- c) Pembebasan bunga/bagi hasil, hanya membayar pokok nya saja

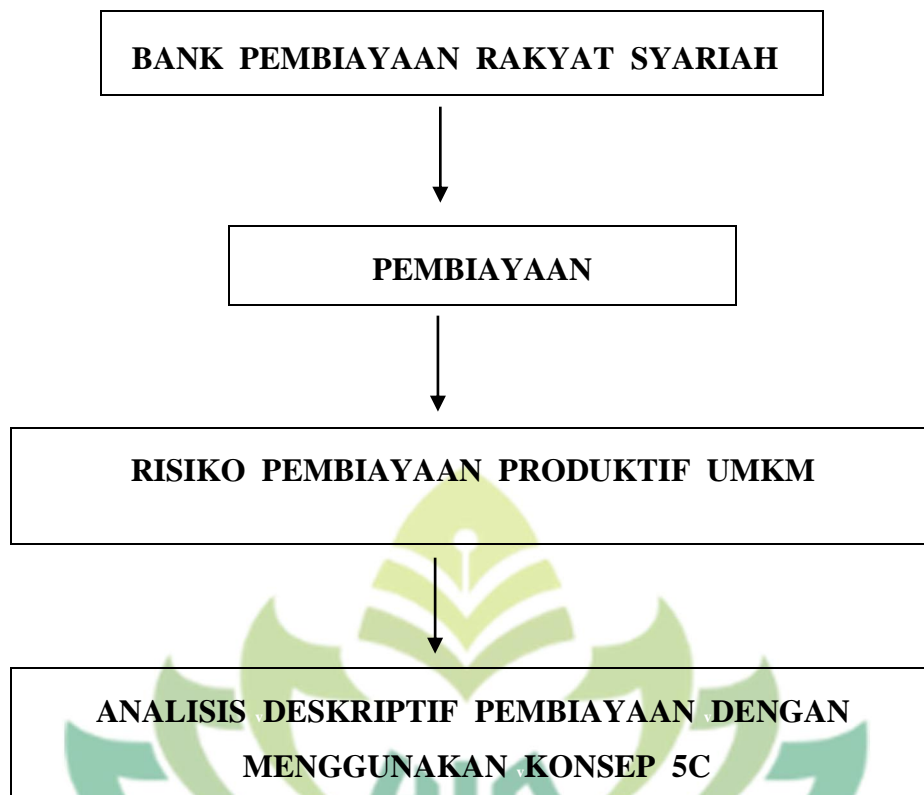
3) *Restructuring*

Dengan menambah jumlah dana pembiayaan/kredit supaya dapat membantu si peminjam.

4) Penyitaan jaminan

Langkah terakhir yang akan di ambil oleh lembaga adalah penyitaan jaminan jika memang si peminjam benar-benar tidak dapat membayar semua hutang nya. Dan jaminan tersebut menjadi pihak lembaga dan bisa di jual untuk menggantikan dana yang di pinjam.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1
Kerangka Pikir

Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi secara langsung ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung dengan berfokus kepada masalah pembiayaan dan resiko pembiayaan produktif UMKM. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan tujuannya dapat menghasilkan *output* berupa analisis deskriptif pembiayaan dengan menggunakan konsep 5C.

E. Tinjauan Pustaka

1. Menurut Wahyu Hidayat, dalam jurnalnya *“Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C dan Maqoshid Syariah dalam Penerapan Manajemen Resiko di BMT”*. Pada penulisan jurnal ini terdapat berbagai macam resiko dalam operasional koperasi syariah seperti resiko pembiayaan, resiko likuiditas, nilai margin, organisasi, solvabilitas, operasional, capital, resiko hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kesemuanya harus dimanage agar resiko dapat ditekan seminimal mungkin agar rencana dan target yang telah dicanangkan dapat terealisasi sehingga menghasilkan kemaslahatan. Di dalam implementasi manajemen resiko dalam koperasi syariah dapat mengkombinasikan antara analisis SWOT, konsep prudential dengan 5C dan Maqoshid Syariah. Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya, “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.” Beliau telah merumuskan tentang maqoshid syariah (tujuan syariah); untuk menjaga akidah, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga jiwa dan menjaga harta. Kemudian diimplementasikan dalam manajemen resiko syariah pada operasional koperasi syariah serta merujuk pada PERMENKOP NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan empiric hal ini mampu menekan timbulnya resiko pada koperasi syariah. Pada

prinsipnya setiap aktifitas bisnis itu memiliki resiko, namun resiko dapat kita minimalisir sampai pada titik terendah apabila kita lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai syariah.⁶⁷

2. Menurut Rosita Ayu Saraswati, dalam jurnalnya *“Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada Pd BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk : (1) mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang dilakukan oleh bank, (3) mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, (4) mengetahui keefektifan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, dan (5) membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang (1) pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, (3) penilaian

⁶⁷ Wahyu Hidayat, “Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C dan Maqoshid Syariah dalam Penerapan Manajemen Resiko di BMT”. *Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Vol. 9No.2 (December) 2019.

prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, (4) keefektifan pengawasan kredit, dan (5) meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur.⁶⁸

3. Menurut Shendy Apriana, Dwi Wahyu, Irwansyah, dalam jurnalnya *“Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”*. Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 1. Character (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.
 2. Capacity (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.
 3. Capital (X3) secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.
 4. Collateral (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. Collateral merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kelancaran pembayaran.
 5. Condition of Economy (X5) secara parsial berpengaruh namun

⁶⁸ Rosita Ayu Saraswati, “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada Pd BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung”. *Jurnal akuntansi*, Vol. 01, No. 1 20012., h. 10.

tidak signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. 6. Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral (X4), Condition of Economy (X5) secara simultan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. 7. Variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin adalah Collateral (X4).⁶⁹

4. Menurut Nanik Eprianti, Dalam jurnal Ekonomi Islam Vol.III, N0.2, Juli 2019 "*Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)*". Pembiayaan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Dalam meminimalisir kredit bermasalah, tahapan analisis kredit harus menerapkan prinsip 5 C secara maksimal. Metode yg digunakan ialah deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu diambil dari annual report dan data sekunder yaitu buku, jurnal dan data yang mendukung dari bank. Hasil analisis perbankan yang ingin menekan tingkat NPF harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu terdapat pilar yang mendukung analisa seperti tiga pilar kelayakan yang menjadi dasar utama dari analisa kelayakan pemberian kredit meliputi :1)

⁶⁹ Shendy Apriana, Dkk, "Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin". *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* Vol. 6, No.1, Juni 2017., h. 9

Kredibilitas manajemen, 2) Kemampuan membayar kembali pembiayaan, 3) Agunan dan 5 (Lima) regulator dalam mengurangi risiko kredit diantaranya: 1) Otoritas Pemberian Pinjaman, 2) Jenis Kredit dan Distribusi Berdasarkan Kategori yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon nasabah, 3) Proses Penilaian diterapkan sesuai ketentuan prinsip proses pembiayaan, 4) Harga Kredit, 5) Penentuan Maturitas/Jatuh Tempo dilakukan untuk meringankan calon nasabah mengembalikan pinjaman ke bank.⁷⁰



⁷⁰ Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)". *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. III, NO. 2, Juli 2019

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadinoto, Suetanto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009.
- Ifham, Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi Revisi 2008.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M.Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, praktik dan prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Kaelan M.S, *Metode penelitian kualitatif interdisiplinier*, Yogyakarta : Paradigma, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP, 2002.
- Muhaheer, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soeratno, Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2008.

- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Umam, Khotibul, *Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009.
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.
- Yaya, Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Salemba 4, 2009.
- Zulkifli, Suharto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

JURNAL

- Andy Ansol Asfina dan Prayudi Setiawan Prabowo, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019, h. 78.
- Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, April 2018, h. 3-4.

Nur Wanita, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 252.

Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)". *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. III, NO. 2, Juli 2019

Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 no. 1, April 2013, h. 122.

Rosita Ayu Saraswati, "Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada Pd BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung". *Jurnal akuntansi*, Vol. 01, No. 1 20012., h. 10.

Shendy Apriana, Dkk, "Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin". *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* Vol. 6, No.1, Juni 2017., h. 9

Wahyu Hidayat, "Integrasi Analisis Swot, Konsep 5C dan Maqoshid Syariah dalam Penerapan Manajemen Resiko di BMT". *Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Vol. 9No.2 (December) 2019.

FATWA DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia , Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*

UNDANG-UUNDANG

Pasal 1 ayat 2, Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah.

Pasal 5 ayat 1 huruf a PBI N o. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 41 No. 13/13/PBI/2011.

Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

Pasal 23 UU perbankan Syariah.

AL-QUR'AN

Depatemen Agama RI, *AL-QURAN Dan TAJWID & TERJEMAHAN*, Bandung :
CV Penerbit Diponegoro, 2010

Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*
Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama.

